

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Ahmad Ghufron.1991.*Hukum Kepegawaian Di Indonesia*.Jakarta:Rineka Cipta.
- A.W.Widjaja.2006.*Administrasi Kepegawaian..*Jakarta: Rajawali.
- Bambang Sunggono.2012.*Metodoogi Peneitian Hukum*.Jakarta: Rajawali Pers.
- Budhi Masturi.2005.*Mengenal Ombudsman Indonesia*.Jakarta: PT Pradnya Paramita.
- Budi Susilo.2007.*Prosedur Gugatan Cerai*.Jakarta: Pustaka Yustisia.
- Faisal Abdullah.2012.*Hukum Kepegawaian Indonesia*.Yogyakarta: PuKAP.
- Hilman Hadikusuma.1990.*Hukum Perkawinan Indonesia Menurut:Perundangan, Hukum adat, Hukum Agama*.Bandung: Mandar Maju.
- Martiman prodjohamidjojo.2002.*Hukum Perkawinan Indonesia*.Jakarta: Indonesia Legal Centre Publishing.
- Mohammad Daud Ali.2004.*Hukum Perkwinan*.Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Muchsan.1982.*Hukum Kepegawaian*.Jakarta:Bina Aksara.
- Musanef.1984.*Manajemen Kepegawaian di Indonesia*.Jakarta:Gunung Agung.
- Rachmadi Usman.2006.*Aspek-Aspek Hukum Perorangan Dan Kekeluargaan Di Indonesia*.Jakarta: Sinar Grafika.
- Ratminto dan Atik Septi Winarsih. 2007. *Manajemen Pelayanan*, Cet. 4. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Soejono Soekanto.2012.*Pengantar Penelitian Hukum*.Jakarta: UI Pers
- W.J.S Poerwadarminta.1986.*Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Zainuddin Ali. 2013. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali

Jurnal

- Antonius Sujata dan Surahman.2002.*Ombudsman Indonesia di Tengah Ombudsman Internasional, Komisi Ombdsman Nasional*.Jakarta.

Ayu Desiana.2013.*Analisis Konsep Pengawasan Ombudsman Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Jurnal)*.Jambi: Universitas Jambi

Hendi Gusti Randa. 2015. *Peran Ombudsman dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Pelayanan Publik*. Lampung.

Skripsi

Affan Supertovoyo.2018.*Pelaksanaan Tugas Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat Terhadap Pencegahan Praktek Maladministrasi Di Satuan Pendidikan SMA Di Kota Padang*. Fakultas Hukum, Padang: Universitas Andalas

Lillahi Ushalli.2015.Tanggung Jawab Nafkah Oleh Suami PNS yang Beragama Islam Terhadap Isteri yang Dicerai Berdasarkan PP No 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi PNS Di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Padang.Padang: Universitas Andalas.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990

Surat Edaran Kepala BAKN Nomor 8/SE/1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS sebagaimana diubah dengan Surat Edaran Kepala BAKN Nomor 48/SE/1990 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan

Pemerintah 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS.

Internet

www.sdm.depkeu.go.id

<http://pgripulosari.blogspot.co.id/2017/03/gaji-dan-tunjangan-pns-menurut-uu-asn.html>

<http://www.badilag.net/data/artikel/alasan%20perceraian%20menurut%20hukum%20islam.pdf>

